

ABSTRAK

Meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia dengan pertumbuhan 20–25% per tahun sejak 2020 menimbulkan kompleksitas hukum dalam transaksi jaminan fidusia. Konflik norma antara Pasal 35 UU Perkawinan yang menetapkan rezim harta bersama secara otomatis dengan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia yang mensyaratkan pemberi fidusia adalah pemilik sah objek jaminan, menciptakan ketidakpastian keabsahan akta dan potensi pertanggungjawaban hukum bagi notaris pembuatnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keabsahan perjanjian jaminan fidusia yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan serta perlindungan hukumnya bagi notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jaminan fidusia dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan ditentukan oleh status kepemilikan objek dan persetujuan pasangan WNA. Objek benda bergerak berupa harta bersama adalah sah dengan persetujuan WNA, sementara objek tidak bergerak yang di luar batasan PP 18/2021 dapat berisiko batal demi hukum karena *fraus legis*. Perlindungan notaris bersifat berlapis, perlindungan preventif melalui *due diligence* dan protokol, serta perlindungan represif melalui hak membela diri dan filter Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66 UUNJ.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Perkawinan Campuran; Perjanjian Perkawinan; Postnuptial Agreement; Perlindungan Hukum Notaris.

ABSTRACT

*The 20–25% annual growth of mixed marriages in Indonesia since 2020 introduces legal complexities in fiduciary security transactions. A conflict arises between Article 35 of the Marriage Law (automatic community property) and Article 1(5) of the Fiduciary Security Law (grantor must be the lawful owner), creating uncertainty over deed validity and notary liability. This normative legal study examines the validity of fiduciary security agreements involving community property in mixed marriages without prenuptial agreements and the legal protection for drafting notaries. Using legislative, conceptual, and case-based approaches with qualitative analysis, the study reveals that agreement validity depends on collateral ownership and foreign spouse consent. Movable community property is valid with the foreign spouse's consent. However, immovable property outside Government Regulation No. 18/2021 risks being null and void due to *fraus legis*. Furthermore, notary protection is multi-layered, encompassing preventive measures (due diligence and protocols) and repressive measures (self-defense rights and Notary Honorary Council screening under Article 66 of the Notary Law).*

Keywords: *Fiduciary Security; Mixed-Nationality Marriages; Prenuptial Agreements; Postnuptial Agreements; Legal Protection by Notaries.*